



Krisis Rohingya Konspirasi Global

Oleh DR H Erwan Effendi, MA

Bukan secara kebetulan, namun sudah didesain bahwa wilayah pemukiman muslim Rohingya sengaja dibidik untuk pengembangan kawasan ekonomi kepentingan bisnis migas China, dan dengan alasan itu mereka bisa digusur dan diusir.

Headline halaman depan *Waspada* terbitan Selasa (12/9/17) mengangkat judul "Myanmar Bertindak Brutal". Judul tersebut diangkat dari pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Kazakhistan, Minggu (10/9). OKI mengancam Myanmar karena "tindakan brutal yang sistematis" terhadap minoritas muslim Rohingya.

Sikap OKI itu telah menunjukkan bahwa kebencian umat Islam sedunia kepada Myanmar-Negara-negara Islam mengancam kebebasan pemerintah Myanmar termasuk para biksu, sebagai tokoh dan pemuka agama, yang ikut membunuh muslim Rohingya di Rakhine. Ironisnya, pemerintah Myanmar menolak gencatan senjata sepihak yang diumumkan oleh Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) meskipun dengan alasan kemanusiaan.

Pemolakan gencatan senjata oleh tentara militer Myanmar membuktikan bahwa pembantaian dan kebrutalan pemerintah Myanmar sengaja dan memang ingin mengebokkan komunitas muslim Rohingya. Justeru, sikap seperti ini maka terbuka di samping krisis kemanusiaan di Rakhine, ada tindakan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan para biksu secara massal. Bahkan, kini tentara Myanmar telah menarasang ranjau darat dalam upaya menghebatkan kembalinya pengungsi dari Bangladesh. Sedihnya, ribuan pengungsi berada pada perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh. Jika kembali ke Myanmar akan berhadapan dengan ranjau yang siap membunuh mereka, sedang untuk masuk ke Bangladesh ditolak.

Hingga kini belum ada pihak yang mampu menghentikan pembantaian ini. Oleh pemerintah Myanmar dan para biksu terhadap muslim Rohingya. Setiap hari terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pemerkosaan tempat tinggal, dan kebrutalan lainnya. Bahkan ada di antara mereka yang dibakar dan dipotong hidup-hidup. Sementara muslim Rohingya tidak dapat melakukan pengaduan dalam bentuk apapun. Mereka terus diusir dari negeri tempat tinggalnya tanpa alasan yang jelas. Padahal, sejumlah negara sudah mengancam dan mendesak agar pemerintah Myanmar segera menghentikan tindakan biadab dan tanpa rasa kemanusiaan itu.

Suara OKI, yang merupakan tempat berkumpulnya Negara-negara Islam, juga diabaikan oleh Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turut mengancam dan meminta hal yang sama. Akan tetapi, suara itu diabaikan untuk hal bagi pemerintah Myanmar. Seperti yang pemerintah Myanmar dan biksu tidak lagi memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan. Justeru, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa negeri sebesar Myanmar berani melakukan tindakan biadab itu walaupun sudah mendapat kecaman dan desakan negara-negara besar. Sulit diterima akal sehat bahwa pemerintah Myanmar dengan kekuatan militer yang dimiliki berani melakukan tindakan itu tanpa ada "bapak angkat" yang siap membantunya. "Bapak angkat" sebagai negara besar dan kuat siap memberikan pembelaan dalam bentuk apapun kepada Myanmar jika terjadi intervensi militer atau boikot ekonomi.

Dan sisi ekonomi, "bapak angkat" yang sedang menguasai ekonomi global itu mempunyai kepentingan besar bagaimana kalau Indonesia yang jagoan sampai tenggangi sekecil apapun. Termasuk dalam upaya pengembangannya Myanmar siap menuliskan keinginan "bapak angkat" sebagai permadial, sehingga sebagian kebijakan pemerintah dikecualikan oleh "bapak angkat". Jika tidak Myanmar siap-stap kolep.

Bukan secara kebetulan, namun sudah didesain bahwa wilayah pemukiman muslim Rohingya sengaja dibidik untuk pengembangan kawasan ekonomi kepentingan bisnis migas China, dan dengan alasan itu mereka bisa digusur dan diusir. Justeru, dari sisi itu maka muncul pandangan bahwa pengusiran bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar bukan persoalan agama. Tapi jika alasan ekonomi tentu tidak harus melibatkan pembantaian, pemerkosaan dan pengusiran. Sebaliknya adalah melakukan pemukiman terlok

bagaimana kehidupan masyarakat setempat bisa hidup layak dan lebih baik. Dari gambaran itu, tidak tertutup kemungkinan apa yang dilakukan oleh Myanmar dan para biksu serta sami yang menyebar kebencian kepada muslim Rohingya di Rakhine adalah merupakan "konspirasi global" untuk memberangus umat Islam. Ini terbukti bahwa China mendukung kebijakan Myanmar membunuh muslim Rohingya. Sementara PBB juga hingga kini belum bersedia menurunkan tentara perdamaian untuk kemanusiaan ke Rohingya.

Politik diskriminasi terhadap masyarakat muslim Rohingya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Myanmar sejak berbagai zaman. Kalau alasan pembantaian tahun ini hanya karena serangan ARSA, sulit diterima. Sebab jika kelompok bersenjata yang melakukan serangan mengapa masyarakat sipil tak bersenjata dan tak berdesa yang harus menjadi korban. Mereka sama sekali tidak melakukan tindakan apapun terhadap negara. Kita belum mengetahui secara pasti kebenaran serangan yang dilakukan oleh ARSA. Karena tidak juga tertutup kemungkinan serangan itu merupakan rekayasa untuk mencari dan membuat alasan melakukan pembantaian terhadap muslim Rohingya. Hal itu terbukti tuduhan tentara Myanmar bahwa yang membakar rumah adalah pemiliknya, terayata tidak benar sebagaimana ditemui wartawan internasional ketika meninjau langsung ke kawasan pemukiman muslim Rohingya yang sudah rata dengan tanah karena terbakar.

Catatan dari berbagai media, politik diskriminasi itu sudah dilakukan pemerintah Myanmar sejak tahun 1785, ketika negara itu bernama Burma. Pada tahun itu ratusan ribu masyarakat muslim Rohingya dipindahkan ke Bangladesh. Memang pada saat itu batas-batas negara antara Bangladesh dengan Myanmar belum begitu jelas. Politik diskriminasi saat itu terlihat sangat absolut. Tahun 1826 hingga 1939, memasuki Perang Dunia ke I dan berakhirnya Perang Dunia ke II, di mana Burma dikuasai oleh Inggris dan Jepang, Inggris cukup lama menduduki Burma, namun bukan berarti politik diskriminasi berakhir bahkan konflik antarsuku Rakhine dan Rohingya terjadi. Sementara itu Bangladesh mengeluarkan kebijakan tidak akan menerima orang muslim Rohingya yang masuk ke negara tersebut.

Tahun 1948, Burma merdeka dan beberapa tahun kemudian berubah nama menjadi Myanmar. Tahun 1978, junta militer mengudesa pemerintah sipil dalam satu operasi militer yang disebut "operasi raja naga" dengan dalih memberantas sejumlah militan di Rakhine yang diduga ingin merestorasi konstitusi. Tahun itu juga terjadi pengusiran cukup besar ke wilayah Bangladesh. Bangladesh protes ke PBB, akhirnya 200 ribu pengungsi

sempat dikembalikan ke Myanmar. Tapi, politik diskriminasi tidak juga berakhir bahkan tahun 1990 diskriminasi terjadi terhadap beberapa etnis minoritas.

Tahun 2012, puncak konflik rasial antara suku Rakhine dengan Rohingya dipicu adanya tindakan kekerasan seksual dan pembunuhan dari masing-masing pihak. Tahun 2014 pemerintah Myanmar membuat kebijakan yang kontroversial karena mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya. Puncaknya pada 2017, Para pengamat menilai, etnis Rohingya yang sudah berada di Arakan/Rohang/Rakhine sejak tahun 1430 layak menjadi warga negara. PBB sempat mencatat, tahun 1990 jumlah muslim Rohingya tercatat 4 juta orang dan tahun 2017 berkurang menjadi 1,3 juta orang. Dikhawatirkan jumlah itu semakin berkurang dengan pembunuhan massal bulan lalu.

Penutup

Sangat sulit menghentikan pemusnahan etnis muslim Rohingya yang dilakukan oleh tentara dan biksu Myanmar. Bahkan PBB sendiri belum bersikap untuk menurunkan tentara kemanusiaan walaupun pembantaian terus terjadi hingga saat ini di tengah kecamaran dunia. Hal ini dapat dipahami karena di belakang Myanmar adalah China yang kepentingan menyelamatkan bisnis migasnya di wilayah Rohingya.

China harus melakukan perluasan pengkasaan ekonominya termasuk di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya 1,3 miliar. Sikap China terhadap tindakan Myanmar menyetujui pembantaian muslim Rohingya harus menjadi pemikiran bagi masyarakat Indonesia. Beberapa negara, *Alhamdulillah* termasuk Indonesia hanya barubisa memberikan bantuan kemanusiaan. Sementara persoalan yang paling mendasar yakni mengembalikan mereka ke tanah kelahirannya belum tersentuh sama sekali.

PBB harusnya bertindak cepat menghentikan pembantaian brutal muslim Rohingya dengan meruntuhkan tentara kemanusiaan, sehingga korban tidak semakin bertambah. Sementara itu pembicaraan mendasar tentang menghibahkan hak-hak masyarakat muslim Rohingya harus dilakukan dan menekan Myanmar untuk menerima mereka kembali. Jika, persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar berkelanjutan, dikhawatirkan akan berdampak pada ketegangannya stabilitas keamanan di kawasan khususnya Asia Tenggara, terutama Indonesia. Sebab, akan muncul mujahid-mujahid yang melakukan pembalasan terhadap pembantaian saudara-saudaranya. Kita tentu tidak menginginkan itu terjadi. Semoga.

Penulis adalah wartawan
Ka. Litbang

